

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Dan hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.²

Perlu kita ketahui bahwa semakin banyaknya praktek prostitusi di Indonesia dan tidak ada penurunan, praktek prostitusi menjadi masalah sosial yang sangat besar apabila berkembang dalam satu komunitas masyarakat, dan yang paling penting telah melanggar nilai moral dalam masyarakat.

¹ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 69

² www.seputarpengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap/ di akses tanggal 28 Oktober 2016

Dalam praktek Pelacuran yang terjadi di wilayah Hukum kecamatan Gempol sangat meresahkan warga sekitar karena terjadi disekitar pemukiman penduduk. Wargapun tidak tinggal diam dengan terjadinya praktek pelacuran yang berjalan, warga melaporkan kepada pihak yang berwenang, dan dari pihak yang berwenang memberikan lamporan kepada Polisi Pamong Praja, lalu dilakukan penindakan anggota Polisi Pamong Praja untuk melakukan pemberantasan kepada pekerja seks komersial untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelacuran atau pekerja seks komersial (PSK) karna telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No 10 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

Pekerja Seks Komersial adalah tindakan wanita yang menjajahkan dirinya atau menjual dirinya kepada lelaki dewasa yang haus dengan kebutuhan biologis. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran Pasal 1 nomor 5 “ Pelacur adalah siapapun baik laki – laki maupun perempuan yang menyebabkan dan atau menyediakan diri kepada umum untuk melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul “, Pasal 1 nomor 6 ” setiap persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelacur “, Pasal 1 nomor 7 “ perbuatan cabul adalah tiap – tiap perbuatan atau hubungan yang bertujuan memuaskan hawa nafsu perkelaminan, menyinggung perasaan kesusilaan atau kesopanan dan atau agama. Bahwa

jelas praktek prostitusi atau pelacuran dilarang oleh Perda karena dapat meresahkan dan mengganggu tetertipan umum.

Dalam penertipan pekerja seks komersial tidak hanya pihak kepolisian saja yang berwenang untuk melakukan penertipan tetapi juga pihak terkait seperti Polisi Pamang Praja yang mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan penertipan terhadap pekerja seks komersial seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran Pasal 3 berbunyi “ Selain anggota Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. Bahwa jelas bahwa praktek pelacuran yang terjadi dilarang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Pelacuran Pasal 2 ayat 2 “ Pelacuran dilarang terang – terangan, memikat orang lain dengan sikap, perkataan – perkataan, isyarat – isyarat, tandan – tanda atau perbuatan yang dianggap melanggar tata susila “

Kita dapat ketahu bahwa hukum pidana kita hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu delik terhadap pihak perantara (mucikari). Bahwa dalam Perundang-undangan tidak aturan secara jelas terhadap pelakunya atau pekerja seks komersial. Oleh karna prostitusi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karna sudah jelas praktek prostitusi merupakan

problematika sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.³

Oleh karna itu penulis tertarik dalam mengangkat fenomena yang terjadi disekitar mengenai pekerja seks komersial (PSK). Penulis menganalisis tentang PEMBERANTASAN TINDAK PELACURAN YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (STUDY DI WILAYAH KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut diatas dapatlah penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberantasan tindak pelacuran yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (di wilayah Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)?
2. Bagaimna efektifitas hukum penindakan terhadap pelaku pelacuran (di wilayah Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemberantasan tindak pelacuran yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (di wilayah Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan).

³ B.Siman djuntak. 1980.pengantar kriminologi dan patologi sosial. Bandung.Tarsito. Hal 354

2. Untuk mengetahui efektifitas hukum penindakan terhadap pelaku pelacuran (di wilayah Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teori dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu Hukum dan Hukum Pidana. Khususnya tindak pidana pelacuran yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan no 10 tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk meningkatkan mekanisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penindakan pekerja seks komersial di wilayah hukum Gempol, serta dapat menjadi tambahan informasi bagi penyidik terkait kendala-kendala dalam penindakan terhadap pekerja seks komersial. Sehingga dalam hal ini di harapkan penyidik mampu mengatasi kendala-kendala tersebut, sekaligus menyelesaikan praktek prostitusi dengan sebaik-baiknya.

- 2.. Bagi Masyarakat

Penelitian dapat digunakan sebagai informasi dan pengetahuan bahwa praktek prostirusi sebagai tindakan yang melanggar

kesusilaan dan melanggar keteripan umum sehingga tidak ragu lagi dalam melaporkan kepada pihak Kelurahan Gempol apabila ada praktek prostitusi yang terjadi lalu dari pihak laporan melakukan laporan kepada Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Pasuruan untuk melakukan tindakan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai pemberantasan tindak pelacuran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melihat tugas dan upaya satuan polisi paman praja dalam penindakan praktek pelacuran.

2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan. Adapun alasan kenapa melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan karena faktanya penulis sering mendengar dan melihat adanya laporan tentang praktek prostitusi yang terjadi, kemudian timbul keinginan untuk melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan melalui wawancara atau interview maupun pendapat yang diperoleh dari sumber informasi utama/pertama dan dokumen-dokumen resmi yang mana semuanya diperoleh langsung dari lokasi penelitian

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan terkait.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data penelitian sebagai berikut :

a. Wawancara atau interview yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung Bapak Hartono

S.H M.M Kabid Penegakan Hukum Perundangan Daerah Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

b. Dokumentasi yaitu berupa pengumpulan data berupa berkas-berkas perkara yang didapat dari lokasi penelitian. Penulis memperoleh pengumpulan data berupa berkas-berkas dari Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Pasuruan yang berkenaan dengan proses penelitian dan penelusuran perundang-undangan.

- c. Observasi yaitu salah satu sarana pengumpulan data sebagai dasar penulis untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai penelitian yang akan diteliti. Penulis terlebih dahulu mengamati lokasi penelitian untuk mendapat keyakinan bahwa praktek prostitusi benar-benar marak terjadi di wilayah hukum Gempol Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini sasaran pengamatan adalah tempat yang sering digunakan praktek prostitusi.

5. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data penelitian baik wawancara atau interview, dokumentasi, kepustakaan maupun penelusuran internet atau studi website telah dirasa cukup, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang sebagaimana menjabarkan atau menguraikan dari hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan dan mendalam mengenai persoalan yang dikaji sehingga dapat ditarik kesimpulan.

F. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penulisan, rencana jadwal penelitian dan rencana sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi dan uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan penulisan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang permasalahan yang diteliti serta pemaparan hasil penelitian terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan berdasarkan pada teori dan kajian pustaka.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan, serta saran-saran dengan harapan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.